



# **PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**

## **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2017**



**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan Baik. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan strategi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Deaerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung msih banyak kekurangan maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung sehingga terwujud Pemerintahan yang baik dan bersih.

Tideng Pale, 23 Januari 2018  
Plt. KEPALA PELAKSANA  
BPBD

**Drs. H. ASNAR**  
NIP. 19600808 198603 1 023

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 DASAR HUKUM .....	1
I.2 GAMBARAN UMUM .....	2
a. Struktur Organisasi .....	2
b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional .....	4
c. Visi Misi .....	5
d. Stategi dan Arah Kebijakan .....	7
BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN .....	9
1. Program dan Kegiatan .....	9
2. Alokasi dan Realisasi Anggaran .....	10
3. Perencanaan Pembangunan .....	10
4. Sarana dan Prasarana .....	11
5. Permasalahan dan Solusi .....	13
BAB III PENUTUP .....	18

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung.
6. Peraturan daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2017 Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang , dan tantangan yang ada.

## **2. Gambaran Umum**

Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tana Tidung dibentuk melalui Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Badan Penanggulangna Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah terletak di Jalan Inhutani Rt.VI Tideng Pale Kecamatan Sesayap.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tana Tidung dipimpin oleh Kepala Badan Pelaksana yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan serta mempertanggung jawabkan kebijakan teknis yang bersifat spesifik dibidang penanggulangan bencana.

#### **a. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a). Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
  - b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
  - a). Sub. Bidang Kesiapsiagaan
  - b). Sub. Bidang Logistik
4. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
  - a). Sub. Bidang Rehabilitasi
  - b). Sub. Bidang Rekosntruksi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada gambar berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCAN ADAERAH**



**b. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,  
Jumlah Pejabat Struktura dan Fungsional.**

➤ Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 1 (Sarjana)	10 Orang
2	D3 / D4	3 Orang
3	SMA	4 Orang
Jumlah		17 Orang

➤ Pangkat / Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	Pembina TK.I / IVb	1 Orang
2	Pembina / IV a	1 Orang
3	Penata TK.I / IIIId	3 Orang
4	Penata Muda TK.I / IIIb	7 Orang
5	Penata Muda / IIIa	1 Orang
6	Pengatur Tk.I / IIId	2 Orang
7	Pengatur / IIc	1 Orang
8	Pengatur Muda / IIa	1 Orang
Jumlah		17 Orang

➤ Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Pejabat Struktural	Jumlah
1	Eselon II	-
2	Eselon III	3 Orang
3	Eselon IV	6 Orang
4	Staf	8 Orang
Jumlah		17 Orang

**c. Visi dan Misi**

➤ Visi

Meningkatkan pembangunan kabupaten tana tidung melalui harmonisasi dalam pendayagunaan potensi Sumber daya manusia, sumber daya alam, Ekonomi pro rakyat, budaya lokal dan iptek menuju kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.



➤ Misi

- Misi Kesatu** : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- Misi Kedua** : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan.
- Misi Ketiga** : Mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
- Misi Keempat** : Menjadikan budaya lokal sebagai fondasi pemanfaatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta konservasi nilai-nilai luhur budaya lokal.
- Misi Kelima** : Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur berbasis Iptek.
- Misi Keenam** : Mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreativitas.
- Misi Ketujuh** : Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara.
- Misi Kedelapan** : Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan.
- Misi Kesembilan** : Mengembangkan agroindustri pertanian.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Tana Tidung, tugas dan fungsi BPBD termasuk dalam Misi Kesatu, Misi Kedua dan Misi Kedelapan.

#### **d. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada dasarnya adalah cara yang dipilih secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan sebab suatu permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan agar diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung telah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis dan efektif untuk menjamin hasil yang maksimal dari pelaksanaan penanggulangan bencana yang telah dirumuskan dan akan dilaksanakan di lapangan secara terpadu. Artinya strategi yang akan dikembangkan bukanlah strategi tunggal yang sifatnya parsial, melainkan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder mulai dari unsur intern BPBD, OPD terkait, dunia usaha maupun unsur masyarakat umum.

Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tana Tidung menjadi dasar pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung. Dengan berdasarkan kepada kajian risiko dan tingkat ketahanan di Kabupaten Tana Tidung. Selain harus disinkronkan dengan rencana

pembangunan daerah, penyusunan rencana startegis BPBD Kabupaten Tana Tidung juga harus disinergiskan dengan Rencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hal ini bermanfaat dalam melihat ketercapaian program nasional serta mempermudah Kabupaten Tana Tidung dalam mendapatkan akses bantuan untuk pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional.

Sinergisasi perencanaan kabupaten dengan propinsi dan pusat dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui 4 strategi utama penanggulangan bencana, yaitu:

- a. Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan
- b. Perencanaan Penanggulangan Bencana terpadu
- c. Penelitian, pendidikan dan pelatihan
- d. Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat

Strategi tersebut menjadi kerangka dasar dalam penyusunan program penanggulangan bencana yang diterjemahkan sebagai focus penanggulangan bencana di Kabupaten Tana Tidung.

## **BAB II**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **1. Program dan Kegiatan**

##### **a. Program Pelayanan Administrasi Pekantoran**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp 3.000.000,-
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik sebesar Rp 12.000.000,-
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan sebesar Rp 190.151.400,-
- Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 70.000.000,-
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp 55.000.000,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 8.000.000,-
- Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 45.000.000,-
- Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp. 600.000.000,-
- Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah Rp. 85.000.000,-
- Pendukung Administrasi Perkantoran Rp. 67.200.000,-
- Penyediaan Bahan Pembersih Rp. 18.847.800,-

##### **b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 135.900.000,-
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 70.530.000,-

c. Program Peningkatan disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Rp. 78.750.000,-

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp. 70.000.000,-

e. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

- Pengadaan Perlengkapan/Kebutuhan Pangan dan Sandang Korban Bencana Rp. 55.000.000,-

## **2. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Alokasi anggaran Badan Penanggulangan bencana daerah bersala dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2017, Anggaran Murni Tahun 2017 Sebesar Rp. 1.988.132.600 dan Anggaran setelah Perubahan Sebesar Rp. 1.571.895.200, dan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 1.488.294.849 dengan Persentase 92.35 %.

## **3. Perencanaan Pembangunan**

1. Perencanaan penanggulangan bencana terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel ;
2. Peningkatan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
3. Penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pasca bencana secara cepat, tepat dan efektif ,terkoordinir dan terpadu;

4. Pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

#### 4. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

✓ Kendaraan Orasional

No	Uraian	Jumlah
1	Kendaraan Dinas Pimpinan	0 unit
2	Kendaraan Dinas Truk Tangki Air	0 unit
3	Kendaraan Dinas Double Gardan	0 unit
4	. Sepeda Motor Trail	0 unit
5.	Sepeda dinas operasional	0 unit
<b>Jumlah</b>		<b>0 unit</b>

✓ Peralatan Kebencanaan

No	Uraian	Jumlah
1.	Tenda Posko	1
2	Tenda Pleton	0
3.	Tenda Pengungsi	1
4.	Tenda Keluarga	5
5.	Genset	1
6.	Velbed	0
7.	Pompa air	0

8.	Pompa air apung	0
9.	Water treatment Portable	0
10.	Perahu karet	0
11.	Chain saw	0
12.	Ponton	0
13.	Senter belor	0
14.	HT	0
15.	RIG	0
16.	Komputer deteksi Gempa	0
17.	Komputer deteksi tanah longsor	0
20.	Handycam	0
21.	Camera digital	0
22.	GPS	0
23.	Matras	150
24.	Lampu Soral Cell	8

Sarana dan prasarana penunjang belum cukup tersedia sebagai bahan penunjang dilapangan apabila terjadinya musibah / bencana di Kabupaten Tana Tidung Khususnya.

## **5. Permasalahan dan Solusi**

### **✓ Permasalahan**

- Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut :

- a. Kondisi geografis Kabupaten Tana Tidung yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dan lain-lain)
- b. Masih banyaknya bangunan rumah penduduk yang terbuat dari bangunan semi permanen atau terbuat dari material kayu, hal ini sangat membahayakan bila terjadi bencana kebakaran pemukiman;
- c. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di OPD selain BPBD;
- d. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tana Tidung;
- e. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia ;
- f. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;



- g. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan
  - h. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.
- Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang ketanggap daruratan dan logistik sebagai berikut :

- a. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- c. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- d. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
- e. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;

- f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Belum memiliki SOP (Standar Operational Prosedur) Penanggulangan Bencana
  - Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

- a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- b. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat;
- c. Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
- d. Koordinasi penilai kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat;
- e. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.

✓ Solusi

1. Dengan tersedianya landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan daerah tentang pembentukan BPBD maka diharapkan BPBD dapat secara optimal melaksanakan fungsi koordinator, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana.
2. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.
3. Segera disusun SOP Penanggulangan Bencana sehingga menjadi acuan pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
6. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
8. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
9. Penyediaan dana kontigensi dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

10. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pengawasan peruntukkan penggunaan lahan;
11. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana mengenai pengurangan risiko bencana.
12. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan;
13. Pemaduan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis kedalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan dokumen laporan tahunan yang memuat, Program dan kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran, Perencanaan pembangunan, Sarana dan Prasarana, serta Permasalahan dan solusi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah bekerja secara maksimal pada tahun 2017 meskipun semaksimal apapun kinerja kami, kami sadar bahwa itu tidak akan memuaskan semua Masyarakat. Kami akan tetap berusaha melaksanakan apa yang sudah diamanahkan sesuai tupoksi kami dan tetap berusaha bekerja dengan maksimal, optimal dan dengan kerja cerdas tentunya.

Dengan demikian Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Badan Peneggulangan Bencana Dearah Tahun 2017 di susun sebagai wujud Komitmen organisasi untuk dapat dicapai pada tahun depan dan semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung.

Plt. KEPALA PELAKSANA

**Drs. H. Asnar**  
Nip. 19600808 198603 1 023



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jl.Inhutani Rt.VI, Desa Tideng Pale Kec.Sesayap 77152

Email: [bpbd.ktanatidung@gmail.com](mailto:bpbd.ktanatidung@gmail.com)



**DATA PEGAWAI PENYUSUN LAPORAN (LPPD) SKPD**  
**KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017**

NAMA : SYANDRA HELDAYANI, S.Pi  
NIP : 19830411 201101 2 003  
PANGKAT/GOL : Penata Muda TK.I / IIIb  
JABATAN : Staf Pelaksana  
OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
NO.HP/WA : 085247130005

Tideng Pale, 11 Januari 2018

Plt. Kepala Pelaksana

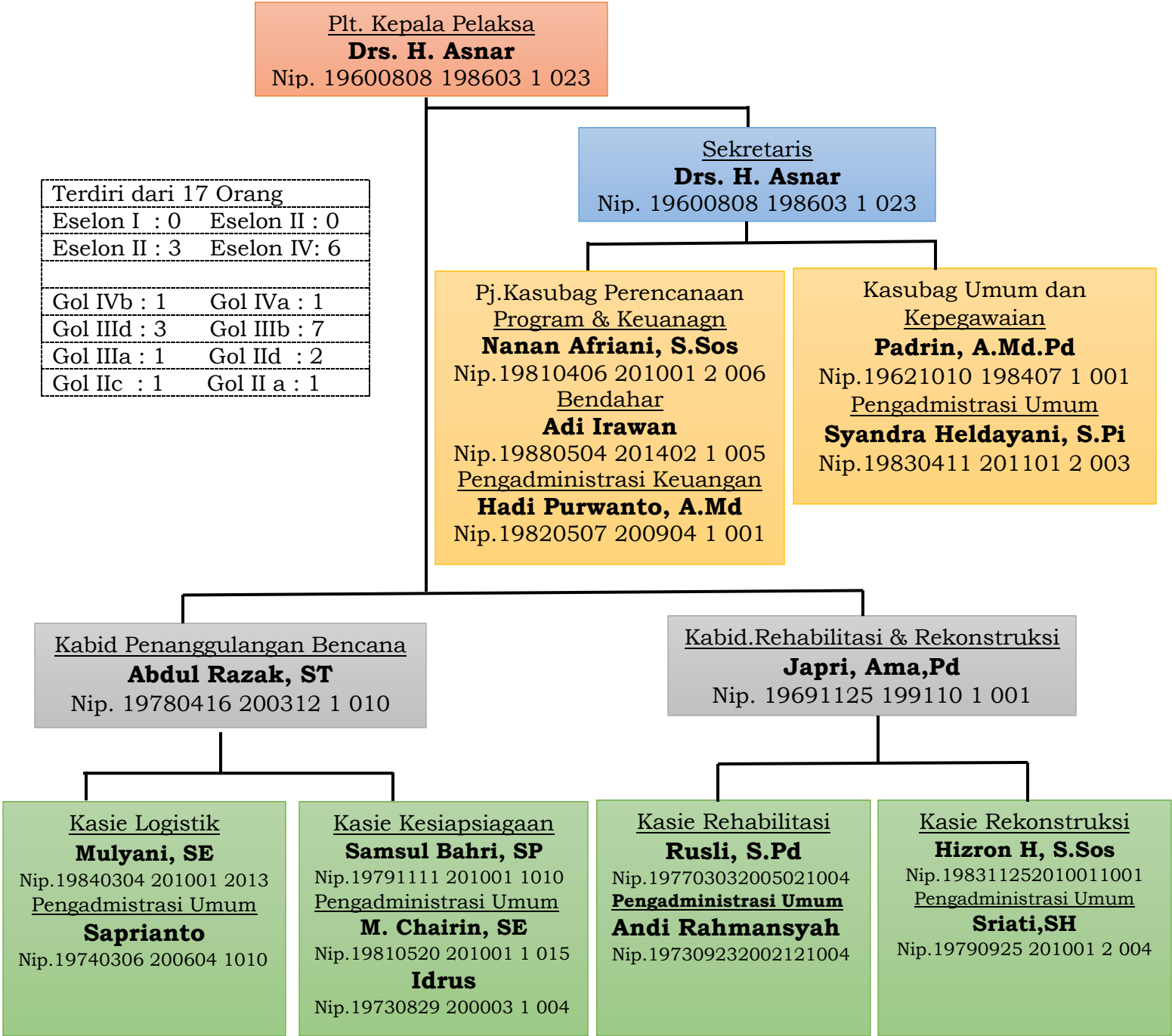
**Drs.H. Asnar**

Pembina TK.I / IVb

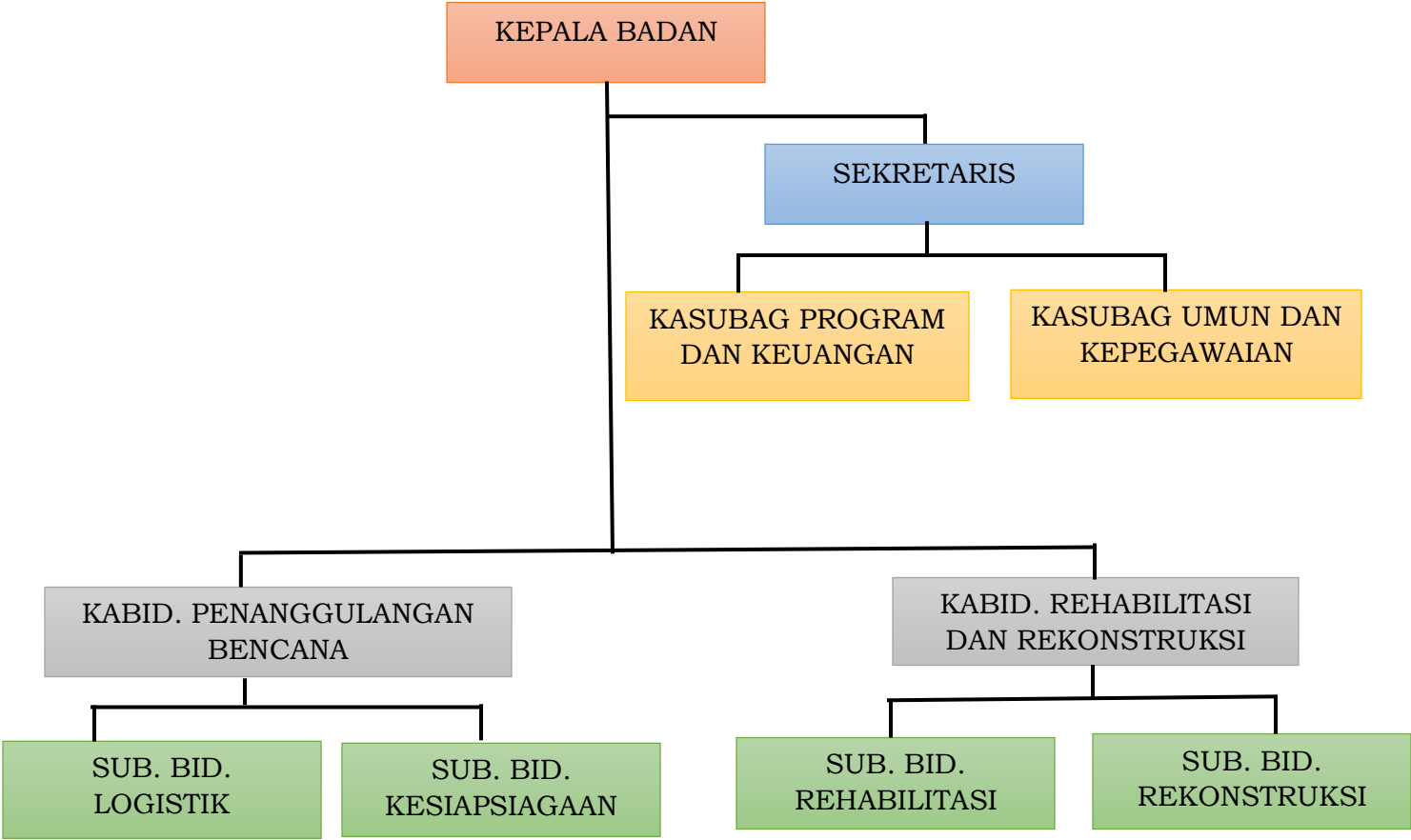
Nip.19600808 198603 1 023

PETE JABATAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCAN ADAERAH



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ADAERAH**



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a). Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
  - b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahi :
  - a). Sub. Bidang Kesiapsiagaan
  - b). Sub. Bidang Logistik
4. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
  - a). Sub. Bidang Rehabilitasi
  - b). Sub. Bidang Rekosntruksi

Plt. Kepala Pelaksana

**Drs. H. Asnar**  
Nip.19600808 198603 1 023



Lampiran  
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

Kabupaten : Tana Tidung

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan yang dilaksanaka :

No	Aspek	Fokus	No	IKK	Rumusan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGRAAN URUSAN PEMERINTAH	Program Nasional <sup>1</sup> (yang melekat dikementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	1	-	-	-	-
		Kesesuain dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah Cq. Kementrian/ LPNK	2	-	-	-	-
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD menurut Peraturan Mentri ( PERMEN)	3	-	-	-	-

No	Aspek	Fokus	No	IKK	Rumusan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian Struktur Jabatan	4		100%	- Jabatn yang ada sebanyak 10 jabatan - Jabatan yang harus ada sebanyak 13 jabatan	100%
			5	Tidak Ada	Tidak ada	0	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kopetensi SDM dalam Meyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	6			- PNS OPD BPBD sebanyak 17 personil -	
			7	5 orang	2,5%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 orang - Pejabat yang ada sebanyak 10 orang	2,5%
			8	5 orang	2,5%	- pejabat yang memenuhi kepangkatan 4 0rang - pejabat yang ad 10 orang	2,5%

No	Aspek	Fokus	No	IKK	Rumusan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD BPBD	9	-REASTRA -RENJA -RKA	Ada 3Dokumen	Dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 4 jenis 1.Renstra 2.Renja 3.Renja Perubahan 4. RKA 5. RKA Perubahan	5 Dokumen
		Sinkronisasi Program Renja BPBD dengan RKPD	10	0	1%	-Program RKPD yang diakomodir dalam Renja BPBD, sebanyak 5 program. -Program Renja BPBD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 Proram	100%
		Sinkronisasi program RKA BPBD dengan Program Renja BPBD	11	5 Program	1%	-Program RENJA BPBD yang diakomodir dalam RKA BPBD sebanyak 5 program -Program dalam RKA BPBD sebanyak 5 Program	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	5 Program	1%	- 5 Program - 5 Progran	100%

No	Aspek	Fokus	No	IKK	Rumusan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi Anggran	13		1,057%	-Total Anggaran BPBD Rp. 1.571.895.200'- -Total Belanja APBD Rp. 1.488.294.849	1,057%
		Besaran Belanja Modal	14		991.7%	- Belanja Modal BPBD Rp. 142.300.000,- - Total Belanja BPBD Rp. 143.500.000,-	991.7%
		Besaran Belanja Pemeliharaan	15			- Total Belanja Pemeliharaan BPBD Rp. 64.859.000 -Total belanja Barang dan Jasa BPBD Rp. 1.344.794.849	0,049%
			16		0,044%	- Total belanja Pemeliharaan BPBD Rp.64.859.000 - Total Belanja BPBD Rp.1.488.294.849	0,044%
		Laporan Keuangan BPBD	17		Neraca dan Calk	Laporan keuangan ada, sebanyak 12 Laporan, - Bulanan	12 laporan

No	Aspek	Fokus	No	IKK	Rumusan	Jenis Data	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAEAH	Manejemen asset BPBD	18	-	Ada	Penomoran Aset	Ada
		Pengguna asset BPBD	19			Asset yang dikuasi sebear Rp. 143.000.000	0%
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI	Bentuk-bentu fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat	20	-	-	-	-
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat.	21	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada